

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Jawa Tengah

Halaman 15

# Tunggakan Pajak Kendaraan Masih Rp2,2 T

CILACAP- Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah, Ihwan Sudrajat mengatakan, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah, baik mobil maupun motor, mencapai 12,7 juta unit.

"Khusus untuk sepeda motor, jumlahnya telah mencapai hampir 10 juta unit. Namun yang pajaknya dibayar hanya 4,3 juta unit. Berarti pemilik motor yang tidak membayar pajak kendaraan mencapai 50 persen. Ini memprihatinkan. Sebab tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan bermotor hanya 70 persen," katanya.

Hal itu dikatakan Ihwan Sudrajat pada acara sosialisasi Peraturan Gubernur Jateng Nomor: 44 Tahun 2017 dan launching Program Pelayanan Bebas Denda Pajak Kendaraan dan Bebas Bea Balik Nama (BBN II) Mutasi Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan di Pendapa Kecamatan Kroya, Cilacap, Senin (21/8).

Acara tersebut dihadiri Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Cilacap Purwanto, Camat Kroya Muhammad Najib, Kasatlantas Polres Cilacap AKP Ahmad Ghifar, Nur Aziz dari Perwakilan Jasa Raharja Purwokerto dan pejabat yang lain.

Menurut Ihwan Sudrajat, sampai saat ini besar tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jateng masih mencapai Rp 2,2 triliun. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor Rp 3,6 triliun.

Uang pajak tersebut akan digunakan untuk membangun jalan. Untuk itu, masyarakat jangan sampai tidak membayar pajak kendaraan. Sebab, kebutuhan untuk mem-



**PAJAK KENDARAAN :** Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jateng, Ihwan Sudrajat didampingi Kasatlantas Polres Cilacap AKP Ahmad Ghifar, Camat Kroya Muhammad Najib dan Nur Aziz dari Perwakilan Jasa Raharja Purwokerto sedang menyerahkan STNK kepada warga yang baru membayar pajak kendaraan. ■ Foto : Agus Sukaryanto/SMNetwork

biayai pembangunan infrastruktur jalan di Jateng mencapai Rp 6 triliun.

"Semua uang pajak kendaraan akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, tidak untuk yang lain," katanya. Jumlah kendaraan yang ada di Jateng namun belum mutasi masuk dan masih berplat nomor dari luar Jateng juga cukup banyak. Di Kota Semarang saja, jumlah kendaraan yang masih menggunakan plat nomor dari luar Jateng, mencapai 15 persen.

### ■ Bebas Denda

Dikatakan, program pelayanan bebas denda pajak kendaraan berlangsung mulai 21 Agustus sampai

30 November 2017. Sedangkan program pelayanan bebas bea balik nama (BBN II) bagi mutasi kendaraan bermotor berlangsung mulai 21 Agustus sampai 30 Desember 2017.

Program tersebut diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jateng Nomor: 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. "Ini merupakan program tahun terakhir. Tahun depan sudah tidak ada program seperti ini lagi. Tahun depan kalau tidak membayar pajak, dikenai denda. Kalau mutasi

kendaraan, juga dikenai bea balik nama," paparnya. Dijelaskan, untuk mendapatkan layanan bebas bea balik nama bagi kendaraan yang mutasi, caranya mudah karena masyarakat tinggal melakukan proses mutasi kendaraan bermotor, baik dari dalam maupun luar provinsi untuk masuk ke Jawa Tengah. Kemudian masyarakat mengajukan permohonan untuk pembebasan sanksi administrasi dan bea balik nama (BBN II) ke samsat.

Dikatakan, Kecamatan Kroya dipilih untuk lokasi launching program tersebut karena tingkat kesadaran masyarakat Kroya untuk membayar pajak cukup tinggi. ■

SMNetwork/ag